



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Upaya Pemerintah Thailand dalam Merekonstruksi Industri
Pariwisata Pasca Tsunami (2005 – 2007)

Skripsi

Oleh

Danastri

2012330011

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Upaya Pemerintah Thailand dalam Merekonstruksi Industri
Pariwisata Pasca Tsunami (2005 – 2007)**

Skripsi

Oleh

Danastri

2012330011

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.Si

Bandung

2017

Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Danastri
Nomor Pokok : 2012330011
Judul : Upaya Pemerintah Thailand dalam Merekonstruksi
Industri Pariwisata Pasca Tsunami (2005 – 2007)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Desember 2016
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

P.Y. Nur Indro, M.Si : _____

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.Si : _____

Anggota

Stanislaus Risadi Apresian, M.A : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danastri

NPM : 2012330011

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Pemerintah Thailand dalam Merekonstruksi
Industri Pariwisata Pasca Tsunami (2005 – 2007)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Desember 2016

Danastri

Abstrak

Nama : Danastri

NPM : 2012330011

Judul : Upaya Pemerintah Thailand dalam Merekonstruksi Industri Pariwisata
Pasca Tsunami (2005 – 2007)

Pariwisata dipandang sebagai komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand. Selain meningkatkan pendapatan negara, pariwisata juga berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Thailand sadar akan pentingnya pariwisata, sehingga kebijakan pembangunan pariwisata dibuat dan promosi gencar dilakukan. Dengan dukungan dari pemerintah yang mendukung pariwisata sebagai salah satu pendorong ekonomi, Thailand dikenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit dunia.

Namun, pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami meluluhlantakkan enam provinsi di wilayah selatan Thailand. Ketiadaan sistem peringatan dini mengakibatkan banyak korban meninggal dan luka. Selain itu tsunami berdampak pada lumpuhnya aktivitas pariwisata dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bencana tsunami juga berdampak pada rusaknya sumber daya alam yang merupakan daya tarik dari wilayah selatan Thailand.

Penelitian ini akan mendeskripsikan upaya Pemerintah Thailand dalam merekonstruksi industri pariwisata pasca tsunami 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam merekonstruksi industri pariwisata Thailand pasca tsunami yang terjadi pada tahun 2004.

Kata Kunci: pariwisata, Thailand, tsunami, rekonstruksi

Abstract

Name : Danastri

NPM : 2012330011

Title : Thai Government's Efforts in Reconstructing Tourism Industry
Post Tsunami (2005 – 2007)

Tourism is seen as an important component in promoting economic growth of Thailand. In addition to increased state revenues, tourism also resulted in the creation of new jobs and improved the welfare of the community. The Thai government realize of the importance of tourism, so that tourism development policy is created and conducted vigorous promotion. With the support of government support to tourism as one of the economic drivers, Thailand is known as one of the world's favourite tourist destinations.

However, on December 26, 2004 tsunami devastated the six provinces in the southern region of Thailand. The absence of an early warning system resulted in many deaths and injuries. The tsunami also resulted in the collapse of the tourism activity in a long time period. In addition to the paralysis affects the tourism activities tsunami also resulted in the destruction of natural resources as an attraction of the southern region of Thailand.

This study will describe Thai Government's efforts in reconstruction tourism industry post tsunami 2004. The purpose of this study is to determine government efforts to reconstruct Thailand's tourism industry post-tsunami that occurred in 2004.

Key words: tourism, Thailand, tsunami, reconstruction

Kata Pengantar

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak pernah habis selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Merekonstruksi Industri Pariwisata Thailand Pasca Tsunami 2004. Skripsi ini merupakan suatu bentuk penelitian dan pra syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia.

Tujuan saya dalam menyusun dan menulis skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Thailand untuk merekonstruksi industri pariwisatanya pasca tsunami 2004. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat, terutama bagi para akademisi lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai industri pariwisata di Thailand.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sering menemui tantangan dan hambatan, tetapi dengan berkat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan yang selalu senantiasa diberikan oleh keluarga, sahabat, dan terutama pembimbing saya Dr. Atom Ginting Munthe M.S., maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran, kritik, serta rekomendasi yang membangun dalam proses perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 15 Desember 2016

Danastri

Ucapan Terima Kasih

Teruntuk ayah dan ibu, adik dan kakak, dan teman – teman yang saya kasihi, terima kasih atas dukungan dan dampingan sampai dengan titik ini. Tidak ada kata selain terima kasihku untuk mengungkapkan rasa syukur atas proses belajar yang telah kita lewati selama ini. Teruslah berkarya! Doaku menyertai kalian semua.

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Literatur.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	21

1.6.2	Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7	Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II Perekonomian Thailand dan Kondisi Industri Pariwisata Pra – Tsunami.....23

2.1	Perekonomian Thailand.....	23
2.1.1	Perkembangan Perekonomian di Thailand.....	23
2.1.2	Krisis Keuangan Asia di Thailand.....	27
2.2	Kondisi Industri Pariwisata Thailand.....	31
2.2.1	Sejarah Pariwisata Thailand.....	31
2.2.2	Kondisi Industri Pariwisata Thailand Pra – Tsunami.....	33
2.2.3	Badan Pariwisata di Thailand.....	38
2.2.4	<i>Trend</i> dan Destinasi Pariwisata di Thailand.....	40

BAB III Dampak Tsunami Terhadap Industri Pariwisata.....47

3.1	Dampak Tsunami Terhadap Sektor Pariwisata.....	47
3.2	Dampak Tsunami Terhadap Terumbu Karang, Perikanan, dan Budidaya Perairan.....	55

BAB IV Rekonstruksi Industri Pariwisata Pasca Tsunami.....58

4.1	Upaya Penanggulangan Bencana.....	58
4.2	Kampanye Pariwisata oleh <i>Tourism Authority of Thailand</i> (TAT).....	65

4.3	Penerapan Program <i>Phuket Action Plan</i>	67
4.3.1	Pemasaran dan Komunikasi.....	69
4.3.2	Pemulihan Masyarakat.....	71
4.3.3	Pelatihan Profesional.....	75
4.3.4	Industri Pariwisata yang Berkelanjutan.....	76
4.3.5	Manajemen Risiko.....	77
BAB V Kesimpulan.....		80
Daftar Pustaka.....		83

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Pendapatan dan Wisatawan Internasional Tahun 1990 – 2007.....	33
Tabel 3.1 Jumlah Korban Meninggal dan Terluka Akibat Bencana Tsunami.....	45
Tabel 3.2 Kedatangan Wisatawan Asing di Bandara Phuket Pada Bulan Januari – Mei 2005.....	49
Tabel 3.3 Perkiraan Nilai Perbaikan dan Pergantian Fasilitas Pariwisata di Daerah Terkena Dampak Tsunami	50
Tabel 3.4 Kerugian dan Kerusakan di Sektor Transportasi dan Komunikasi.....	55
Tabel 4.1 Data Perbaikan Rumah di Masing – Masing Provinsi.....	58

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Pertumbuhan dan Produktivitas Agrikultur di Thailand	
	Tahun 1962 – 2006.....	22

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, orang - orang selalu menyempatkan dirinya untuk pergi berlibur dalam aktivitas kerja maupun setelah kegiatan akademis berakhir. Ada yang senang berlibur dengan keluarga atau teman, tetapi ada pula yang melakukan perjalanan secara individu atau sendiri. Bagi beberapa orang, *travelling* merupakan sarana untuk menghilangkan rasa jenuh ketika penat bekerja atau dalam aktivitas sehari – hari. Namun, bagi beberapa orang perjalanan sengaja dilakukan untuk mendapatkan arti yang berbeda bagi setiap pelakunya seperti merasakan pengalaman baru, belajar bahasa baru, menemukan jati diri, menghadapi diri pada situasi sulit, atau mengalami budaya baru. Di lain sisi perjalanan memiliki efek yang lebih besar dari pengalaman yang dirasakan oleh orang yang melakukan perjalanan tersebut.

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perseorangan ataupun kelompok, sebagai usaha mencari, keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.¹ Pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan pergerakan

¹ James J. Spilane, *Ekonomi Pariwisata*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 21

orang ke tempat atau negara lain di luar lingkungan tempat mereka melakukan tujuan profesional pribadi atau bisnis.² Dalam pertemuan United Nation on World Tourism Organization di Manila tahun 1980, pariwisata dianggap sebagai kegiatan mendasar yang penting bagi kehidupan bangsa karena memiliki efek langsung pada sektor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi dari masyarakat nasional dan hubungan internasional mereka.³ Beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari pariwisata meliputi pelaku dan objek wisata. Orang – orang yang melakukan perjalanan tersebut dapat disebut pengunjung, turis, pelancong, atau wisatawan. Sedangkan objek wisata atau yang sering kita sebut destinasi wisata adalah tempat tujuan yang akan dikunjungi.⁴

Objek wisata pun memiliki jenis – jenis yang berbeda bergantung pada tujuan seseorang melakukan perjalanan. Seseorang yang ingin merasakan keindahan alam sekitar tentu akan berkunjung ke pantai, gunung, sungai, gua, atau objek alam lainnya. Berbeda dengan orang yang ingin merasakan kedamaian upacara keagamaan, ia tentu akan mengunjungi tempat ibadah masyarakat sekitar. Adapula wisatawan yang bepergian sekedar untuk berbelanja.

Setelah Perang Dunia II dapat dikatakan bahwa industri pariwisata telah berkembang dengan pesat di berbagai negara dan menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi negara – negara yang mengelola sektor kepariwisataannya. Dari

² “Understanding Tourism: Basic Glory”, World Tourism Organization, <http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary>, diakses pada 5 Oktober 2015

³ “Collection of Tourism Expenditure Statistics”, World Tourism Organization, <https://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf>, diakses pada 8 Oktober 2015,

⁴ World Tourism Organization, *Op.cit.*

tahun 1950 – 1970 masyarakat cenderung melakukan perjalanan ke negara – negara di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian, pada tahun 1970an masyarakat mulai melirik Asia, Afrika, dan Timur Tengah sebagai destinasi liburan. Pengeluaran terbesar untuk wisata adalah orang Amerika, Jerman Barat, Jepang, Perancis dan Belanda. Namun, dari pengeluaran yang sebesar US\$ 68 milyar tahun 1983, hanya sebagian kecil yang terjadi di negara – negara sedang berkembang. Cina menerima 8 juta wisatawan pada tahun 1980, Meksiko 4,2 juta wisatawan dan Singapura 2,6 juta wisatawan. Penerimaan turis jauh lebih besar di negara negara Utara daripada negara selatan. Walaupun di negara Utara penerimaan pariwisata merupakan bagian sangat kecil dari Produk Domestik Bruto (PDB), di negara selatan penerimaan ini jauh lebih besar.⁵

Jika diamati pertumbuhan sektor – sektor perdagangan dan industri mengalami penurunan sejak tahun 1970 dan sektor pariwisata mengalami perkembangan. Pada tahun 1977, pengeluaran wisata di dunia mencapai 317 miliar US\$, sedangkan pengeluaran dunia di bidang persenjataan sebesar 300 miliar US\$. Bisnis pariwisata dunia dalam tahun 1979 mencapai 504 miliar US\$, dan meningkat menjadi 564 miliar US\$ tahun 1980.⁶ Sampai dengan pada tahun 2000, penerimaan pariwisata internasional mampu mencapai 476 miliar US\$ dan berkembang hingga 1.159 miliar US\$ pada tahun 2013. Terlepas dari penerimaan di negara tujuan, pariwisata menghasilkan pendapatan ekspor melalui jasa transportasi penumpang. Pada tahun 2013 total penerimaan ekspor pariwisata dunia mencapai 1,4 triliun US\$.

⁵ James J. Spilane, *Op.cit.*, hal 37 – 38.

⁶ James J. Spilane, *Op.cit.*, hal 40.

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi ternyata industri pariwisata dunia dari tahun ke tahun semakin berkembang meyakinkan. Pariwisata menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak negara yang mengelolanya khususnya di negara berkembang. Manfaat dari penyebaran pariwisata ini berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor mulai dari perhotelan, telekomunikasi, hingga pertanian.⁷ Pariwisata adalah industri yang menarik karena kemampuannya untuk menciptakan pendapatan, pajak, pergerakan mata uang, dan omset tinggi dalam berbagai bentuk dan pekerjaan telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan kepada masyarakat di berbagai negara di seluruh dunia.

Terletak di pusat Asia Tenggara⁸, Thailand merupakan negara dengan luas area 514.000 kilometer persegi di pusat semenanjung Asia Tenggara. Berbatasan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, Malaysia, dan memiliki 2.420 kilometer garis pantai di Teluk Thailand dan Laut Andaman.⁹ Thailand memiliki iklim tropis dan suhu yang bekisar antara 19 – 38 derajat celcius. Musim hujan berlangsung antara bulan Mei hingga Juli dan musim panas atau kering terjadi sekitar bulan November dan Desember.¹⁰ Thailand adalah negara dengan sumber daya yang melimpah, memiliki berbagai macam flora, fauna, dan zona ekologi yang berbeda. Terdapat lebih dari 100 taman nasional, termasuk diantaranya 20 taman laut, dan masing – masing taman nasional memiliki atraksi yang unik. Ada banyak pilihan

⁷ “Why Tourism?”, World Tourism Organization, <http://www2.unwto.org/content/why-tourism>, diakses pada 22 September 2015

⁸ Tourism Thailand, <http://www.tourismthailand.org/Thailand/geography>, diakses pada 8 Oktober 2015

⁹ “Thailand Info”, United Nation Thailand, <http://un.or.th/thailand/geography.html>, diakses pada 8 Oktober 2015

¹⁰ *Op.cit.*

kegiatan bagi para wisatawan yang berkunjung, mulai dari *trekking*, bersepeda gunung, fotografi, berkemah, *diving*, ataupun kegiatan wisata lainnya. Kunjungan ke Pantai merupakan pilihan favorit pengunjung untuk bersantai, merasakan kehidupan bawah laut yang eksotik, bahkan belajar untuk menyelam.¹¹ Thailand juga merupakan negara dengan sejarah yang menarik dan budaya Budha yang indah. Bagi wisatawan budaya, Thailand merupakan tempat dari kuil – kuil kuno, menara, dan istana yang indah.¹² Tidak hanya itu, Thailand juga terkenal dengan wisata kontemporer lainnya seperti wisata kuliner, perkotaan, pedesaan, taman hiburan, hingga seks.

Sejak berlangsungnya Perang Vietnam, Thailand merupakan tujuan wisata bagi tentara Amerika Serikat dan berkembang menjadi salah satu negara paling berkembang industri pariwisatanya di Negara Dunia Ketiga. Pada tahun 1996, Thailand mampu menduduki peringkat sebelas sebagai penghasil pariwisata internasional terbesar, melampaui Hong Kong dan China. Dengan jumlah wisatawan yang datang lebih dari 7 juta orang, Thailand merupakan penerima wisatawan terbesar kedua di Asia Tenggara, setelah Malaysia, pada tahun 1997.¹³ Hingga pada tahun 2004, pendapatan negara terhadap industri pariwisata dan jumlah wisatawan yang datang selalu meningkat. Namun, bencana tsunami yang melanda wilayah selatan Thailand pada akhir tahun 2004 melumpuhkan aktivitas pariwisata.

¹¹ *Ibid.*

¹² “The Top 10 Places in Thailand”, Never Stop Traveling, <http://www.neverstoptraveling.com/the-top-10-places-in-thailand>, diakses pada 13 Oktober 2015.

¹³ Nick Kontogeorgopoulos, *Tourism in Thai Patterns, Trends, and Limitation*, Pacific Tourism Review, Vol.2 (1998), hal 225 – 226

Untuk mengembalikan kondisi industri pariwisata khususnya di wilayah selatan Thailand maka dibutuhkan campur tangan baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi internasional. Rekonstruksi memiliki arti pengembalian seperti semula, penyusunan atau penggambaran kembali.¹⁴ Adapun berdasarkan UU No. 24/2007 rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana.¹⁵ Upaya rekonstruksi dicapai melalui usaha pemerintah dan kerjasama dengan badan donor atau bantuan berupa fasilitas akses terhadap produk yang dapat mengurangi dampak negatif dari bencana alam.¹⁶ Untuk mengembalikan ke keadaan semula, khususnya di industri pariwisata, maka dibutuhkan pembangunan kembali dalam berbagai hal seperti hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan jalur transportasi.

Thailand merupakan salah satu tujuan wisata utama di dunia sejak tahun 1980an. Pendapatan yang diterima dari sektor ini mencapai 550 miliar Baht atau setara dengan 16 miliar US\$.¹⁷ Walaupun hanya berkontribusi sebesar 7% di dalam Produk Domestik Bruto (PDB), pariwisata mampu membuka lebih dari 4 juta pekerjaan pada tahun 2009. Berdasarkan pada pencapaian Thailand yang mampu menarik wisatawan, peneliti memilih Thailand sebagai topik penelitian.

¹⁴ “Rekonstruksi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada 12 Juni 2016

¹⁵ BNPB, Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

¹⁶ “International Bank for Reconstruction and Development”, The World Bank, <http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd>, diakses pada 12 Juni 2016

¹⁷ “Economics and Politics”, Tourism Authority of Thailand, <http://www.tourismthailand.org/About-Thailand/Economy-Politic>, diakses pada 12 Juni 2016

1.2 Identifikasi Masalah

Akhir tahun 2004, bencana alam tsunami melanda negara – negara yang berada di sekitar Laut Andaman. Tsunami “Boxing Day” diyakini tsunami paling mematikan, menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara yaitu, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh, Afrika Selatan, Madagascar, Kenya, Tanzania, dan Seychelles.¹⁸ Hal ini berdampak tidak hanya pada bertambahnya korban jiwa, namun juga berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Di Thailand, tsunami berdampak parah pada enam provinsi pesisir di sepanjang Laut Andaman, yaitu Provinsi Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang, dan Satun tetapi provinsi yang paling terpengaruh adalah Phang Nga khususnya Kabupaten Khao Lak. Pemerintah Thailand melaporkan sebanyak 5.393 orang tewas, 8.457 luka – luka dan 3.062 hilang.¹⁹

Peristiwa ini merupakan bencana alam terbesar dalam sejarah dan membutuhkan upaya bantuan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat pesisir tidak hanya pada kehidupan dan tempat tinggal, tetapi juga mempengaruhi mata pencaharian mereka. Tidak hanya rumah penduduk yang hanyut oleh air, begitu pula kapal, hotel, *guest house*, kafe dan kios- kios *souvenir* yang mereka andalkan untuk mata pencaharian mereka ikut hanyut.

¹⁸ Raziye Akkoc, “2004 Boxing Day tsunami facts”, The Telegraph, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/11303114/2004-Boxing-Day-tsunami-facts.html>, diakses pada 23 September 2015.

¹⁹ UNEP, *National Rapid Environmental Assessment*, Thailand, 2005.

Tanggap darurat setelah bencana alam difokuskan pada penyediaan tempat penampungan dasar, makanan, dan bantuan medis untuk masyarakat yang terkena dampak, dan pencarian dan misi penyelamatan bagi korban terdampar di pantai terpencil dan pulau-pulau kecil. Adapun bantuan teknik yang diadopsi oleh *World Tourism Organization* (WTO) untuk membantu industri pariwisata negara – negara yang dilanda tsunami. Rencana aksi darurat tersebut diberi nama *Phuket Action Plan* yang diadopsi pada 1 Februari 2005. Tujuan utama dari Rencana Aksi Phuket adalah untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata di tempat yang terpengaruh tsunami, melanjutkan operasi pariwisata pada waktu normal dengan memaksimalkan infrastruktur yang ada, dan membantu bisnis pariwisata beserta karyawan. Rencana aksi dibagi menjadi beberapa wilayah operasional yaitu, komunikasi pemasaran, bantuan komunitas, pelatihan profesional, pembangunan berkelanjutan, dan manajemen risiko.²⁰

Walaupun telah menerima berbagai bantuan baik berupa dana dan pendampingan teknis pada awal terkena tsunami, Thailand sangat mengandalkan sumber daya dalam negeri untuk memperbaiki sarana dan prasarana industri pariwisata. Lebih dari 100.000 orang kehilangan pekerjaan di industri pariwisata dan diperkirakan 500.000 pekerjaan sektor pariwisata hilang akibat dampak tsunami. Pemerintah menambah anggaran pemasaran dan promosi pariwisata sebesar 800 juta Baht atau sekitar 19.500 juta US\$ pada tahun 2005 untuk menarik wisatawan kembali. Strategi pemasaran dan promosi pasca tsunami bertujuan untuk membuka pasar baru yang berasal dari Cina, Jepang, Australia

²⁰ “Phuket Action Plan Adopted by WTO”, Leisure Tourism, <http://www.cabi.org/leisuretourism/news/5619>, diakses pada 18 Oktober 2015.

dan Selandia Baru dengan cara mempromosikan produk pariwisata baru seperti pariwisata medis dan spa, menargetkan pengeluaran belanja wisatawan, membangun marina baru, dan memperluas Bandara Phuket dan Krabi. Pemerintah Thailand juga memprakarsai beberapa acara berkelas tingkat internasional untuk menarik perhatian media dunia seperti *Miss Universe* di Bangkok yang terselenggara pada bulan Mei dan Agustus 2005. *World Vision* bekerja sama dengan *Tourism Authority of Thailand* (TAT) mengundang peselancar profesional, Bethany Hamilton, untuk menyoroti kemajuan kemanusiaan di Phuket.²¹

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dibuat, peneliti membatasi penelitian dengan melihat pada upaya pemerintah dalam merekonstruksi industri pariwisata Thailand pasca tsunami tahun 2004 dengan melihat pula permasalahan yang terjadi dalam proses rekonstruksi. Periode waktu yang diambil adalah tahun 2005 hingga tahun 2007 karena fasilitas fisik dan non fisik yang mendukung pariwisata sudah dibangun kembali dan ditandai dengan meningkatnya wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

1.2.2 Perumusan Masalah

Identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan membawa peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana upaya**

²¹ Alison Rice, “Post Tsunami Tourism Reconstruction and Tourism: a Second Disaster?”, Tourism Concern, England, Oktober 2005.

pemerintah dalam merekonstruksi industri pariwisata Thailand pasca tsunami tahun 2004?”

1.3 Tujuan & Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan oleh peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam merekonstruksi industri pariwisata Thailand pasca tsunami 2004.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini nantinya menjadi karya tulis yang mampu memberikan informasi mengenai upaya pemerintah dalam merekonstruksi industri pariwisata Thailand pasca tsunami 2004.

1.4 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengkaji lebih lanjut mengenai hal – hal yang menjadi acuan atau dasar pemikiran, juga untuk mengetahui definisi mendalam yang terkait dengan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti telah memilih beberapa referensi data dari buku, jurnal, dan artikel.

Bacaan pertama, didapat dari buku yang berjudul *10 Management Lesson for Host Governments Coordinating Post-disaster Reconstruction* karya Executing Agency for Reconstruction (BRR) of Aceh-Nias 2005 – 2009. Dalam

buku ini dijelaskan bagaimana upaya BRR dalam merekonstruksi atau membangun kembali kehidupan dan harapan masyarakat Aceh dan Nias paca bencana tsunami akhir bulan Desember 2004. BRR membagi tiga tahap dalam rangka proses rekonstruksi. Pertama, dalam tahap *organize* harus segera dibentuk badan koordinasi yang memadai. Kemudian, menunjuk tim kepemimpinan yang berpengalaman untuk mendapatkan dukungan penuh dari instansi pemerintah lainnya dan lembaga donatur. Lalu, mempertahankan pola pikir krisis melalui upaya rekontruksi, melembagakan dan mempertahankan rasa urgensi dan fleksibilitas yang kuat antar lembaga pemerintah, donatur dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selanjutnya, implementasi yang kuat dalam mengkoordinasi institusi untuk mengisi kesenjangan rekonstruksi. Kedua, dalam tahap *execute* harus ada pemenuhan kebutuhan dasar, mengisi kesenjangan rantai pasokan, membangun koordinasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses rekonstruksi. Tidak lupa, “*build back better*” merupakan semangat yang dipegang dalam setiap kesempatan. Kemudian, memanfaatkan lembaga mitra sebagai pendukung koordinasi dengan cara meningkatkan efektivitas lembaga koordinasi. Lalu, mengelola penerimaan bantuan dan kemajuan rekonstruksi harus melalui komunikasi yang berkelanjutan. Tahap terakhir adalah *fund*. Dalam tahap ini ada 2 cara, yaitu memastikan integritas dan akuntabilitas bantuan untuk mendapatkan dukungan dari donatur. Cara yang kedua, dibutuhkan penggabungan diplomasi, otoritas dan fleksibilitas untuk memastikan arus pendanaan bertemu dengan kebutuhan aktual.²² Buku ini dapat memberikan pemahaman bagi peneliti

²² Executing Agency for Rehabilitation and Reconstruction, *10 Management Lesson for Host*

mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga utama koordinasi dari program rekonstruksi bencana skala besar khususnya tsunami.

Kedua, adalah jurnal berjudul *Recovery Process in Thailand after The 2004 Indian Ocean Tsunami* oleh Srivichai, Supharatid, dan Imamura. Di dalam jurnal ini, penulis menjelaskan dampak tsunami terhadap kondisi sosial dan ekonomi seperti korban jiwa, kerusakan perumahan, properti penunjang pariwisata dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand, sektor swasta, hingga organisasi internasional. Beberapa upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand yang bekerjasama dengan sektor swasta dan organisasi internasional adalah menyusun sistem evakuasi, membangun pusat peringatan bencana serta pemasangan instalasi peringatan bencana berupa *warning tower* dan *warning buoy*, dan diseminasi pengetahuan mengenai bencana alam yang terjadi. Respon pemulihan jangka pendek dan jangka panjang yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen bencana pada masyarakat khususnya yang terkena dampak tsunami. Jurnal karya Srivichai, Supharatid, dan Imamura ini membantu peneliti memahami upaya membangun sistem peringatan dini bencana sebagai salah satu aspek rekonstruksi industri pariwisata.

Ketiga, adalah jurnal berjudul *Tsunami Recovery: A Case Study of Thailand's Tourism* oleh Bongkosh Ngansom Rittichaiuwat. Dalam jurnal ini Ia menjelaskan keadaan pariwisata Thailand pasca tsunami khususnya pada awal tahun 2005, di mana banyak negara mengingatkan warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Thailand. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk

mengevaluasi keberhasilan “fun package” murah yang ditawarkan Thailand untuk menarik wisatawan ke Phuket, Khao Lak, dan Phi Phi. Kemudian jurnal ini juga menggambarkan bagaimana industri perhotelan beroperasi pasca tsunami, alasan wisatawan untuk datang kembali ke Thailand, dan upaya pemulihan bencana. Jurnal ini ditulis berdasarkan penelitian sistematis yang dilakukan pada fenomena bencana di pariwisata, efek dari peristiwa tsunami pada industri pariwisata, dan tanggapan dari industri dan instansi pemerintah dalam mengatasi dampak tersebut. Dari penjelasan Rittichainuwat dalam jurnal, peneliti paham akan motivasi wisatawan untuk kembali mengunjungi daerah yang terkena tsunami. Peneliti juga memahami proses pembuatan promosi dan paket wisata dan dampaknya terhadap industri pariwisata pasca tsunami untuk menarik wisatawan ke daerah – daerah yang terkena dampak tsunami.²³

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menanggapi dan menjelaskan permasalahan yang terjadi peneliti akan menggunakan paradigma Neo-liberal institusional. Neo-liberal institusional dianggap sebagai teori yang relevan dan mampu membantu menjelaskan upaya Pemerintah Thailand. Teori gagasan Robert Keohane secara unik menggabungkan dua teori besar Hubungan Internasional yang saling bertolak belakang. Teori ini mendukung pendekatan realisme mengenai sistem dunia internasional yang bersifat anarki dan bahwa sifat negara merupakan hasil perhitungan rasional dari

²³ Bongkosh Ngansom Rittichainuwat, *Tsunami Recovery: A Case Study of Thailand's Tourism*, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, November 2006.

kepentingan mereka. Neoliberal pun mendukung gagasan liberalisme bahwa keberhasilan akibat koperasi atau kerjasama di bawah kondisi anarki mungkin terjadi. Menurut Keohane peran institusi internasional mampu mengurangi dampak negatif dari kompetisi antar negara.²⁴

Neoliberal institusional menyatakan perubahan yang terjadi pada sistem dunia menjadi dasar bagi terbentuknya kerjasama. Negara beroperasi di dalam dunia dengan tingkat kompleksitas yang terus meningkat dengan jumlah isu dan variasi lainnya yang semakin bertambah. Oleh karena itu negara dengan keadaannya harus mengakui keterbatasannya dalam menyelesaikan tugas dan tidak mampu menyediakan solusi yang dibutuhkan tanpa kerjasama dengan negara lain. Sebuah pemerintahan global diyakini mampu tercipta dengan kondisi dunia yang bersifat anarki dimana norma serta institusi yang ada pada pemerintahan global mampu mengurangi kompetisi antar negara dan membatasi tindak kekerasan yang mungkin dilakukan dalam usaha negara mencapai kepentingannya.²⁵

Dalam menjelaskan argumen mereka tentang kerjasama, Neo-liberal menggunakan permainan *Prisoner's Dilemma*. Negara sering merasa khawatir tentang potensi negara lain, apakah negara tulus bekerjasama atau justru menyalahgunakan kerjasama antar negara seperti yang dirasakan narapidana. Negara juga menghadapi masalah mengkoordinasikan tindakan mereka pada hasil kerjasama yang dicapai. Negara – negara yang terlibat mungkin tidak setuju dengan hasil yang dicapai karena setiap negara memiliki implikasi distribusi yang

²⁴ Nicholas J. Wheeler, *Transcript: Theories of International Relations – Liberalism*, melalui Universitas Birmingham, <http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/government-society/mooc/neo-liberalism.pdf> diakses pada 15 Januari 2016.

²⁵ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, *International Relations*, (Pearson, 2004), hal. 101

berbeda. Ketidaksepakatan tentang bentuk kerjasama merupakan penghalang utama terjadinya kerjasama dan mekanisme koordinasi yang ada dapat menyebabkan negara gagal untuk menangkap potensi keuntungan dari kerjasama. Dalam situasi yang kompleks, lembaga atau institusi internasional dapat masuk untuk memberikan solusi sehingga kerjasama dapat terjadi. Munculnya institusi membantu mengurangi kekhawatiran kecurangan yang mungkin dilakukan negara. Institusi mendistribusikan tentang keuntungan dari kerjasama dan memfasilitasi penyelesaian konflik antar negara.²⁶

Prinsip resiprositas atau timbal balik merupakan prinsip penting dalam kerjasama. Perilaku seseorang seringkali merupakan hasil dari perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hubungan internasional, prinsip ini mengacu pada karakteristik aktor – aktor yang tercipta dari aksi dan reaksi dalam system global. Permasalahan *collective goods* dan kepentingan antar aktor dapat diselesaikan melalui penerapan prinsip resiprositas dengan cara memberi penghargaan atau hukuman sebagai dampak dari kontribusi positif dan merugikan yang dilakukan oleh aktor dalam hubungan internasional.²⁷

Untuk membantu menjelaskan realita bencana alam tsunami yang terjadi di Thailand dibutuhkan konsep mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana. Konsep *Disaster Risk Management* (DRM) sebagai suatu disiplin ilmu muncul baru pada tahun 1990-an, ketika para ahli dan praktisi terlibat dalam *United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction*. Berdasarkan pada keadaan akhir tahun 1999 masih sangat sedikit pemerintah yang memiliki

²⁶ Robert O. Keohane dan Lisa L. Martin, *The Promise of Institutional Theory*, *International Security* Vol. 20 No. 1, (Summer, 1995), hal 45

²⁷ Nicholas J. Wheeler, *loc. cit.*

kebijakan atau program untuk mengurangi risiko ketika menghadapi bencana alam. Van Niekerk, Mokonyama, dan Reid (2002) menjelaskan akar permasalahan dari manajemen risiko yang pertama kali terjadi di Afrika Selatan dimana hingga Juni 1994, Afrika Selatan belum memiliki pendekatan terhadap penanganan bencana. Pertemuan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tersebut memicu dibentuk Komite Antar-Menteri dalam Penanggulangan Bencana tahun 1997, penerbitan dokumen Kertas Hijau tentang Penanggulangan Bencana tahun 1998, dokumen Kertas Putih tentang Penanggulangan Bencana tahun 1999, dan akhirnya dibuatlah Undang – Undang Pengelolaan Bencana nomor 57 tahun 2002. *Disaster Risk Management* ditandai sebagai proses multisektoral dan multidisiplin yang terintegrasi untuk perencanaan dan pelaksanaan langkah – langkah pengurangan risiko, pemulihan bencana, dan rekonstruksi.²⁸

Dalam konsep DRM atau sering dikenal dengan istilah penanggulangan bencana terdapat tahap – tahap yang harus dilakukan oleh otoritas penanggulangan bencana yang disebut dengan mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam tindakan mitigasi langkah awal yang harus dilakukan ialah melakukan kajian risiko bencana terhadap suatu lokasi terjadinya bencana dan pengetahuan akan bahaya, kerentanan, kapasitas suatu wilayah sangatlah penting. Bahaya merupakan kejadian yang memiliki potensi terjadinya kecelakaan maupun bencana. Sedangkan kerentanan adalah kondisi yang menentukan apakah bahaya

²⁸ Gerrit van der Waldt, *Disaster Risk Management: Disciplinary status and prospects for a unifying theory*, Jambá: Journal of Disaster Risk Studies 5(2), Art. #76, 2014, hal. 3

yang terjadi dapat menimbulkan bencana atau tidak. Kapasitas adalah kemampuan memberi tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia. Penilaian risiko bencana ini dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dan menambah kapasitas daerah. Kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan antara lain adalah pelatihan kesiap-siagaan, pengkondisian rumah, dan peningkatan pengetahuan dampak bencana.²⁹

Lebih jauh lagi, diperlukan keberlanjutan dalam pengembangan program pariwisata sehingga menimbulkan peningkatan di segala bidang khususnya kegiatan ekonomi suatu negara. Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan pertama kali pada sebuah laporan berjudul *Our Common Future* yang diterbitkan *World Commission on Environment and Development* (WCED) tahun 1987. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep “cair” yang mampu beradaptasi sesuai kondisi dan situasi dimana permasalahan tersebut berada.

Ada beberapa prinsip yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, adalah komitmen ekuitas dan keadilan dalam prioritas yang harus diberikan dalam meningkatkan kondisi kemiskinan dunia dan keputusan yang dibuat harus memperhitungkan hak – hak generasi mendatang. Kedua, pandangan jangka panjang yang menekankan prinsip kehati – hatian. Seperti contoh, bila terjadi

²⁹ “Mitigasi”, Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana, http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html, diakses pada 15 Januari 2017

kerusakan maka kurangnya kepastian ilmiah tidak dapat menjadi alasan dalam menunda langkah-langkah efektif untuk mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mewujudkan integrasi, pemahaman, dan bertindak pada interaksi antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.³⁰

Setiap negara yang mengedepankan industri pariwisatanya tentu akan mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas pariwisata tersebut untuk tetap terjaga dan dapat dinikmati di masa mendatang. Menurut *United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sustainable tourism* dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan masa kini dan masa mendatang dan dapat memberi solusi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan dan masyarakat setempat.³¹ Konsep *sustainable tourism* mulai dikenal sejak masuk dalam pembahasan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 1992 dalam konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brasil muncul kesadaran bahwa peningkatan ekonomi dirasa penting tetapi negara juga harus mengawasi penggunaan sumber daya alam untuk kebutuhan aktivitas ekonomi dan melestarikan lingkungannya. Sektor pariwisata lebih lanjut didiskusikan pada *Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: plan for sustainable tourism development* tahun 1996 oleh tiga organisasi internasional yaitu, *the World Travel and Tourism Council, the World*

³⁰ United Nation, *Sustainable Development: from Brundtland to Rio 2012*, prepared for consideration by the High Level Panel on Global Sustainability at its first meeting, New York, 19 September 2010, hal. 2.

³¹ “Sustainable Development of Tourism”, World Tourism Organization, <http://sdt.unwto.org/content/about-us-5>, diakses pada 15 Januari 2016

Tourism Organization, dan *the Earth Council* sebagai salah satu rencana aksi dalam perlindungan sumber daya alam dan budaya sebagai inti dari bisnis pariwisata. Agenda 21 menjelaskan prioritas dan rencana aksi dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pariwisata dan mewujudkan industri pariwisata yang berkelanjutan.

Rencana aksi tersebut diadopsi oleh *Commission for Sustainable Development* dalam Konferensi PBB tahun 1999. Dalam konferensi didiskusikan bagaimana pentingnya pariwisata dalam sektor ekonomi yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menyediakan akses terhadap pembangunan infrastruktur.³² Salah satu aktivitas penting dalam konferensi PBB tahun 1999 adalah menetapkan panduan manajemen pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari tiap – tiap negara, terdiri dari 9 artikel peraturan bagi pemerintah, *travel agents*, *tour operations*, *developers*, tenaga kerja pariwisata, wisatawan, dan tuan rumah. Kemudian panduan pariwisata berkelanjutan diadopsi pada saat *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg tahun 2002.

Sampai dengan saat ini pariwisata yang berkelanjutan dapat mengembangkan pedoman yang dapat diterapkan di segala bentuk pariwisata. Ada 3 konsep yang harus dikedepankan dalam aktivitas pariwisata³³ yaitu:

³² Department of Economic and Social Affairs, *The Global Importance of Tourism*, United Nations, New York, April 1999, hal 1 - 2

³³ World Tourism Organization, *loc. cit.*

1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin yang merupakan kunci dalam pembangunan pariwisata, menjaga proses ekologi, dan membantu pelestarian alam,
2. Menghargai keaslian budaya dan sosial dari masyarakat tuan rumah. Melestarikan budaya, adat, nilai – nilai tradisional, dan berkontribusi dalam interaksi antar budaya,
3. Memastikan kegiatan ekonomi berlangsung lama dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk bagi tenaga kerja pariwisata, serta memberikan layanan sosial pada masyarakat dan berupaya memberantas kemiskinan.

Adapun dalam tulisan Frederico Nato yang berjudul *Moving Beyond Environmental Protection* dijelaskan perkembangan pariwisata di suatu negara merupakan sarana untuk mengurangi kemiskinan. Pertama, dengan diaktifkannya sektor pariwisata maka akan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi tenaga kerja tidak terampil. Kedua, pariwisata berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dimana hal ini merupakan dampak dari terbukanya lapangan pekerjaan. Ketiga, aktivitas pariwisata cenderung memanfaatkan sumber daya alam dan budaya sebagai aset yang dimiliki masyarakat menengah ke bawah.³⁴

³⁴ Frederico Nato, *A New Approach to Sustainable Tourism Development: Moving Beyond Environmental Protection*, DESA Discussion Paper No. 29, Maret 2003, United Nations.

1.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini akan digunakan untuk mengungkap makna dari data – data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori serta konsep yang digunakan.³⁵ Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan apa upaya pemerintah dadalam merekonstruksi industri pariwisata Thailand pasca tsunami tahun 2004.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif mengandalkan kumpulan beberapa bentuk data seperti wawancara narasumber, observasi, dokumen negara, dan informasi audiovisual daripada hanya bergantung pada satu sumber data.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data berupa dokumen negara, literatur berupa buku dan jurnal, dan artikel – artikel yang relevan.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*, (London: Sage Publication, 2002), hal. 19.

³⁶ *Ibid*, hal 432

BAB II Perekonomian Thailand dan Kondisi Industri Pariwisata Pra – Tsunami. Bab ini akan menggambarkan perekonomian Thailand sebelum terjadinya tsunami khususnya sektor – sektor mana saja yang menjadi unggulan bagi perekonomian Thailand hingga terjadinya krisis keuangan di Thailand. Kemudian dijelaskan pula perkembangan industri pariwisata di Thailand yang akan dijelaskan melalui sejarah pariwisata Thailand, kondisi industri pariwisata Thailand pra – tsunami, badan pariwisata di Thailand, trend an destinasi pariwisata di Thailand.

BAB III Dampak Tsunami Terhadap Industri Pariwisata. Pada bab ini akan dijelaskan pengaruh tsunami terhadap industri pariwisata yang terbagi di menjadi dua bagian yaitu sektor pariwisata sebagai permasalahan utama dalam penelitian ini dan terumbu karang, perikanan, dan budidaya perikanan sebagai pendukung dari industri pariwisata di Thailand.

BAB IV Rekonstruksi Industri Pariwisata Pasca Tsunami. Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam merekonstruksi industri pariwisata pasca tsunami. Peneliti akan mendeskripsikan upaya Pemerintah Thailand tersebut menggunakan teori serta konsep yang digunakan dalam kerangka pemikiran. Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu sub bab pertama membahas mengenai pengurangan risiko bencana, sub bab kedua membahas mengenai kampanye pariwisata, dan sub bab ketiga mengenai penerapan program *Phuket Action Plan*.